

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

DKI Jakarta merupakan pusat aktivitas ekonomi, pemerintahan, dan jasa terbesar di Indonesia yang terus mengalami pertumbuhan penduduk secara signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2024), jumlah penduduk DKI Jakarta mencapai sekitar 10,67 juta jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 16.704 jiwa per kilometer persegi, menjadikannya salah satu kota dengan kepadatan tertinggi di Asia Tenggara. Menurut *United Nations* (2022), lebih dari 55% penduduk dunia kini tinggal di kawasan perkotaan, dan proyeksi menunjukkan angka ini akan mencapai 68% pada tahun 2050, Jakarta menjadi salah satu episentrum dari tren urbanisasi masif tersebut di kawasan Asia. Kepadatan yang demikian tinggi tidak hanya berdampak pada tekanan terhadap ruang dan infrastruktur kota, tetapi juga memunculkan kompleksitas persoalan ekonomi pada tingkat rumah tangga, khususnya dalam hal kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

Sebagai wilayah perkotaan yang hampir seluruh lahannya digunakan untuk permukiman, komersial, dan infrastruktur, Jakarta hampir tidak memiliki lahan produktif untuk kegiatan pertanian konvensional. Data Badan Pusat Statistik DKI Jakarta (2023) menunjukkan bahwa lahan hijau produktif dan pertanian di Jakarta telah menyusut drastis akibat alih fungsi lahan yang berlangsung selama beberapa dekade, sehingga tidak ada kapasitas produksi pangan lokal yang signifikan di tingkat kota. Kondisi ini menyebabkan hampir seluruh kebutuhan pangan masyarakat Jakarta dipenuhi melalui mekanisme pasar, diperoleh dari pasar tradisional, pasar modern, maupun jalur distribusi dari daerah penyangga seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan sekitarnya.

Menurut Bappenas (2019), sekitar 96% kebutuhan pangan Jakarta dipasok dari luar wilayah, menjadikan kota ini salah satu wilayah dengan tingkat ketergantungan pangan eksternal tertinggi di Indonesia. Pola ketergantungan struktural semacam ini, sebagaimana dijelaskan oleh Sonnino

(2016), menciptakan apa yang disebut sebagai *food system vulnerability*, kerentanan sistemis yang muncul ketika rantai pasokan pangan menghadapi gangguan, baik akibat bencana alam, gangguan distribusi, maupun volatilitas harga. Ketergantungan penuh terhadap sistem distribusi eksternal ini menempatkan keluarga perkotaan dalam posisi yang rentan; ketika harga pangan ber gejolak di pasar, tidak ada penyangga internal yang dapat melindungi daya beli rumah tangga.

Kerentanan tersebut terbukti nyata dalam data pengeluaran rumah tangga. Menurut Badan Pusat Statistik (2024), rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk DKI Jakarta mencapai Rp 2.791.716, tertinggi di seluruh provinsi Indonesia. Kelompok makanan dan minuman masih menjadi komponen pengeluaran yang signifikan dalam anggaran rumah tangga. Buletin Konsumsi Pangan Kementerian Pertanian (2024) mencatat bahwa pengeluaran pangan per kapita per bulan mengalami kenaikan sebesar 5,69% pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, dengan kenaikan tertinggi pada kelompok padi-padian sebesar 18,09% dan buah-buahan sebesar 25,09%. Porsi yang besar dari pengeluaran pangan dalam anggaran keluarga bukanlah semata fenomena statistik, melainkan memiliki implikasi nyata dalam dinamika ekonomi rumah tangga. Angka-angka ini menunjukkan bahwa beban pengeluaran pangan rumah tangga terus meningkat, dan bagi keluarga yang tidak memiliki alternatif produksi pangan mandiri, kondisi tersebut langsung menekan kemampuan ekonomi rumah tangga secara keseluruhan.

Pengelolaan pengeluaran pangan merupakan salah satu dimensi paling kritis dalam tata kelola sumber daya rumah tangga. Deacon dan Firebaugh (1988) menjelaskan bahwa keluarga pada dasarnya beroperasi sebagai unit manajerial yang mengelola sumber daya terbatas meliputi waktu, uang, energi, dan keterampilan, untuk mencapai tujuan-tujuan rumah tangga. Ketika sumber daya finansial yang tersedia tidak mampu mengimbangi kenaikan harga pangan, keluarga menghadapi pilihan yang sulit: mengurangi kualitas atau kuantitas konsumsi pangan, mengorbankan pengeluaran non-pangan yang juga penting (seperti pendidikan anak atau akses layanan kesehatan), atau berupaya

menemukan sumber alternatif pemenuhan kebutuhan pangan di luar mekanisme pasar.

Manser dan Brown (1980) serta McElroy dan Horney (1981) dalam model ekonomi rumah tangga menjelaskan bahwa keputusan alokasi sumber daya dalam keluarga bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh perubahan harga relatif, termasuk harga pangan. Dengan demikian, kenaikan harga pangan secara sistematis mendorong terjadinya realokasi anggaran rumah tangga yang tidak selalu menguntungkan bagi kesejahteraan anggota keluarga secara keseluruhan.

Tekanan pengeluaran pangan semakin diperparah oleh volatilitas harga komoditas pangan yang terus berlangsung. Data Badan Pangan Nasional (2023) mencatat bahwa harga beras nasional mengalami kenaikan sebesar 14,08% sepanjang tahun 2023, sementara harga gula naik sekitar 20% pada periode yang sama. BPS juga mencatat inflasi sektor pangan mencapai 6,6% pada akhir tahun 2023, angka yang melampaui inflasi umum dan berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Di tingkat DKI Jakarta secara khusus, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi dari tahun ke tahun sebesar 5,59% pada Januari 2024 (BPS DKI Jakarta, 2024). Namun, dampak inflasi pangan terhadap kesejahteraan rumah tangga tidak dapat dipahami sekadar dari angka persentase kenaikan harga.

Christiaensen dan Subbarao (2005) menunjukkan bahwa inflasi pangan memiliki dampak yang secara proporsional lebih besar terhadap kelompok masyarakat yang mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk pangan, karena tidak ada substitusi yang mudah bagi komoditas pangan pokok. Berbeda dengan harga barang elektronik atau pakaian yang kenaikannya dapat ditunda pembeliannya, kenaikan harga bahan pangan pokok langsung menekan anggaran rumah tangga setiap harinya tanpa mekanisme penundaan konsumsi yang memadai. Fenomena ini diperkuat oleh Ivanic dan Martin (2008) yang menemukan bahwa inflasi pangan berdampak secara asimetris, rumah tangga yang membeli pangan di pasar, sebagaimana umumnya keluarga perkotaan, lebih rentan terhadap kenaikan harga dibandingkan dengan rumah tangga yang memproduksi sebagian kebutuhan pangannya sendiri. Fenomena inflasi pangan

yang berulang ini menciptakan kondisi di mana keluarga perkotaan yang sepenuhnya bergantung pada pasar harus menghadapi lonjakan pengeluaran yang tidak dapat diprediksi, sehingga mengguncang stabilitas ekonomi rumah tangga.

Inflasi pangan menciptakan apa yang dikenal dalam literatur sebagai efek penggeseran (*crowding-out*) pada pengeluaran non-pangan (Regmi & Meade, 2013). Ketika porsi pengeluaran untuk pangan meningkat akibat inflasi, kemampuan keluarga untuk mengalokasikan anggaran ke sektor-sektor yang mendukung akumulasi modal manusia dan modal finansial seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan tabungan menjadi tertekan. Rothstein (2007) menjelaskan bahwa efek jangka panjang dari penggeseran (*crowding-out*) pengeluaran non-pangan ini dapat berdampak pada mobilitas sosial keluarga, karena investasi pada modal manusia seperti pendidikan anak merupakan salah satu jalur utama peningkatan kondisi ekonomi dalam jangka panjang.

Terkait situasi di Jakarta, di mana biaya pendidikan dan layanan kesehatan termasuk dalam kategori tertinggi secara nasional, tekanan inflasi pangan yang mengurangi alokasi ke sektor-sektor tersebut memiliki konsekuensi yang melampaui sekadar persoalan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Ini menegaskan bahwa mitigasi beban pengeluaran pangan bukan sekadar soal efisiensi konsumsi, melainkan menyentuh dimensi yang lebih luas dari keberlanjutan kehidupan keluarga perkotaan.

Melihat dari perspektif *Sustainable Livelihoods Framework* (SLF) yang dikembangkan oleh Chambers dan Conway (1992) dan kemudian dielaborasi lebih lanjut oleh Department for International Development/DFID (1999), kondisi tersebut menggambarkan kerentanan kehidupan masyarakat perkotaan yang berakar dari terbatasnya aset sumber daya yang dapat dimanfaatkan sebagai penyangga ekonomi. Chambers dan Conway (1992) menjelaskan bahwa suatu kehidupan dapat dikatakan berkelanjutan apabila mampu menghadapi berbagai tekanan dan perubahan tanpa mengurangi kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup secara jangka panjang.

SLF mengidentifikasi empat komponen utama yang saling berinteraksi: (1) *vulnerability context*, yaitu konteks kerentanan yang dihadapi rumah tangga

berupa guncangan (*shocks*), tekanan (*trends*), dan perubahan musiman (*seasonality*); (2) *livelihood assets*, yaitu modal penghidupan yang dimiliki rumah tangga meliputi modal manusia, alam, fisik, finansial, dan sosial; (3) *livelihood strategies*, yaitu strategi-strategi yang diterapkan rumah tangga dalam mengombinasikan aset yang dimiliki untuk mencapai tujuan penghidupan; dan (4) *livelihood outcomes*, yaitu hasil yang dicapai dari strategi penghidupan tersebut, seperti peningkatan penghasilan, ketahanan pangan, dan kesejahteraan. Keluarga yang seluruh kebutuhan pangannya bergantung pada mekanisme pasar beroperasi dalam *vulnerability context* yang tinggi; tekanan inflasi yang terus-menerus dan keterbatasan kapasitas produksi mandiri menjadi faktor-faktor yang melemahkan posisi penghidupan mereka.

Ketahanan ekonomi keluarga merupakan konsep multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan kemampuan finansial, melainkan mencakup kapasitas rumah tangga untuk mempertahankan kesejahteraan dalam menghadapi berbagai bentuk ketidakpastian ekonomi. Mendukung pandangan ini, Garman dan Forgue (2011) menjelaskan bahwa ketahanan ekonomi keluarga dapat dioperasionalkan melalui beberapa indikator, antara lain: kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (termasuk pangan, sandang, dan papan), ketersediaan tabungan sebagai penyangga finansial untuk menghadapi risiko, tingkat utang yang terkendali, serta kemampuan keluarga untuk berinvestasi dalam pendidikan dan kesehatan.

Murdayasa dan Yuliana (2022) menambahkan dimensi kemandirian pemenuhan kebutuhan dasar sebagai salah satu indikator ketahanan ekonomi keluarga yang relevan dalam konteks perkotaan, yaitu sejauh mana keluarga tidak sepenuhnya bergantung pada mekanisme pasar untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Dimensi kemandirian ini memiliki relevansi khusus dalam penelitian ini, karena urban farming secara konseptual berkaitan erat dengan penurunan ketergantungan terhadap pasar dalam pemenuhan kebutuhan pangan.

Besarnya porsi pengeluaran pangan dalam anggaran rumah tangga memiliki implikasi langsung terhadap kondisi ketahanan ekonomi keluarga. Ketika pengeluaran untuk kebutuhan pangan menyerap porsi yang terlalu besar

dari total pendapatan, kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan lain, seperti pendidikan, kesehatan, atau tabungan untuk menghadapi risiko, menjadi terbatas. Doriza (2015) menjelaskan bahwa pengelolaan pengeluaran merupakan salah satu dimensi penting dalam ekonomi keluarga, dan kemampuan menekan beban pengeluaran kebutuhan pokok secara langsung berkaitan dengan stabilitas ekonomi rumah tangga.

Rozaki dkk. (2021) menegaskan bahwa ketahanan ekonomi keluarga mencakup setidaknya tiga dimensi yang saling berkaitan: pertama, ketahanan pendapatan (*income resilience*), yaitu kemampuan mempertahankan atau meningkatkan aliran pendapatan; kedua, ketahanan pengeluaran (*expenditure resilience*), yaitu kemampuan mengelola dan menekan pengeluaran agar tidak melebihi pendapatan yang tersedia; dan ketiga, ketahanan aset (*asset resilience*), yaitu kemampuan mempertahankan aset yang dapat digunakan sebagai penyangga pada saat terjadi guncangan ekonomi. Pandangan ini melihat bahwa ketahanan ekonomi keluarga bukan semata soal seberapa besar pendapatan yang diperoleh, melainkan juga soal seberapa efektif keluarga mengelola sumber daya yang tersedia agar kebutuhan dasar dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

Ati dan Herawati (2023) menegaskan bahwa ketahanan ekonomi keluarga berkaitan erat dengan kemampuan rumah tangga melakukan penyesuaian terhadap kondisi ekonomi melalui strategi adaptasi yang mencakup pengelolaan pengeluaran, diversifikasi sumber pangan, dan pemanfaatan sumber daya di lingkungan sekitar. Konsep strategi adaptasi ekonomi keluarga merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan rumah tangga sebagai respons terhadap tekanan atau guncangan ekonomi untuk mempertahankan atau meningkatkan kondisi penghidupan mereka (Ellis, 2000). Keluarga yang mampu mengembangkan strategi adaptasi ekonomi terbukti lebih tahan terhadap tekanan ekonomi dibandingkan keluarga yang hanya mengandalkan satu sumber pendapatan atau satu mekanisme pemenuhan kebutuhan. Strategi adaptasi tersebut memiliki urgensi yang tinggi mengingat biaya hidup yang tinggi dan dinamika harga pangan yang tidak selalu dapat diprediksi.

Salah satu bentuk strategi adaptasi ekonomi yang berkembang di wilayah perkotaan dan telah menarik perhatian akademik yang signifikan dalam dua dekade terakhir adalah urban farming, praktik produksi pangan yang memanfaatkan lahan terbatas di lingkungan perkotaan. Menurut *Food and Agriculture Organization* (FAO, 2022), urban farming merupakan kegiatan produksi pangan yang dilakukan di wilayah perkotaan dengan memanfaatkan sumber daya dan ruang yang tersedia secara lokal, mulai dari pekarangan rumah, atap gedung, lorong sempit, hingga ruang publik yang dialihfungsikan secara produktif. Berbeda dengan pertanian konvensional yang membutuhkan lahan luas, urban farming dapat dilakukan melalui berbagai teknik adaptif seperti hidroponik, sistem budidaya tanpa tanah yang menggunakan larutan nutrisi, vertikultur yang memaksimalkan ruang vertikal, aquaponik yang mengintegrasikan budidaya ikan dan tanaman, serta budidaya dalam wadah (*container gardening*), sehingga cocok diterapkan di lingkungan padat penduduk seperti Jakarta (Despommier, 2010; Eigenbrod & Gruda, 2015).

Kementerian Pertanian Republik Indonesia (2021) menjelaskan bahwa urban farming merupakan bentuk pemanfaatan ruang terbatas di kawasan perkotaan untuk menghasilkan komoditas pangan secara efisien, sekaligus mendukung ketahanan dan kemandirian pangan masyarakat. Posisi urban farming sebagai strategi adaptasi ekonomi keluarga sejalan dengan kategori strategi substitusi dan diversifikasi yang dikemukakan Ellis (2000): melalui urban farming, keluarga menyubstitusi sebagian pembelian pangan di pasar dengan produksi mandiri, sekaligus mendiversifikasi sumber pemenuhan kebutuhan dasar mereka dari ketergantungan tunggal terhadap mekanisme pasar.

Relevansi urban farming bagi ketahanan ekonomi keluarga terletak pada potensinya memutus, atau setidaknya mengurangi, ketergantungan rumah tangga terhadap pembelian pangan dari pasar. Keterkaitan urban farming dengan ketahanan ekonomi keluarga dapat dipahami melalui tiga jalur utama yang dijelaskan dalam literatur. Pertama, jalur pengurangan pengeluaran langsung (*direct expenditure reduction*), ketika sebagian kebutuhan pangan, seperti sayuran, bumbu dapur, atau tanaman hortikultura lainnya, dapat diproduksi secara mandiri, pengeluaran tunai untuk pembelian komoditas

tersebut di pasar berkurang secara proporsional. Zezza dan Tasciotti (2010) menemukan bahwa urban farming berkaitan dengan pengurangan pengeluaran pangan yang terukur di tingkat rumah tangga. Kedua, jalur perlindungan terhadap inflasi (*inflation hedging*): produksi pangan mandiri memberikan keluarga semacam tameng parsial terhadap lonjakan harga pasar. Ketika harga cabai, sayuran, atau bumbu dapur melonjak di pasar, keluarga yang memproduksinya secara mandiri tidak terdampak kenaikan harga tersebut secara langsung, suatu bentuk perlindungan nyata yang diistilahkan oleh Smith dkk. (2001) sebagai *in-kind food production buffer*. Ketiga, jalur alokasi ulang anggaran (*budget reallocation*): pengurangan pengeluaran pangan yang berkaitan dengan urban farming secara langsung membebaskan sejumlah anggaran yang dapat dialihkan ke pos pengeluaran lain yang bernilai strategis bagi keluarga, seperti pendidikan anak, akses layanan kesehatan, atau penguatan tabungan darurat. Orsini dkk. (2013) menegaskan bahwa urban farming berpotensi memberikan manfaat ekonomi nyata bagi keluarga melalui pengurangan biaya konsumsi sehari-hari. Penting untuk ditekankan bahwa manfaat ini tidak harus dikaitkan dengan kondisi kemiskinan; keluarga dari berbagai lapisan sosial ekonomi di perkotaan dapat memperoleh keuntungan dari efisiensi pengeluaran yang dihasilkan urban farming.

Mok dkk. (2014) menjelaskan bahwa urban farming memiliki potensi meningkatkan akses rumah tangga terhadap pangan segar melalui pemanfaatan ruang yang tersedia di wilayah perkotaan, dan dalam kondisi di mana *vulnerability context* keluarga perkotaan ditandai oleh tekanan inflasi pangan yang berkelanjutan, inisiatif semacam ini menjadi relevan sebagai salah satu *livelihood strategy* yang adaptif. Scoones (1998) dalam pengembangan SLF menegaskan bahwa dalam konteks kerentanan yang tinggi, diversifikasi strategi penghidupan merupakan respons rasional rumah tangga untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber dan memperkuat ketahanan terhadap guncangan.

Perkembangan urban farming di DKI Jakarta berlangsung melalui berbagai inisiatif, baik yang diprakarsai oleh masyarakat secara mandiri maupun yang difasilitasi melalui program pemerintah. Salah satu platform yang

dimanfaatkan untuk pengembangan urban farming berbasis komunitas di Jakarta adalah Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), sebuah fasilitas publik yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai ruang interaksi sosial sekaligus wahana berbagai kegiatan produktif masyarakat.

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 196 Tahun 2015, RPTRA dirancang sebagai ruang publik multifungsi yang tidak hanya menyediakan wahana bermain dan kegiatan sosial, tetapi juga mendorong produktivitas masyarakat. Keberadaan RPTRA dengan lahan yang tersedia, dukungan pengelolaan, dan jaringan komunitas yang aktif menjadikannya lokasi yang strategis untuk pengembangan program urban farming yang bersifat inklusif dan berkelanjutan. RPTRA sebagai institusi fasilitator dapat dipandang sebagai komponen *transforming structures and processes* yang menjembatani antara ketersediaan aset penghidupan di tingkat komunitas dengan strategi penghidupan yang dapat diakses oleh anggotanya (DFID, 1999).

Salah satu RPTRA yang telah mengembangkan program urban farming secara aktif dan berkelanjutan adalah RPTRA Rawa Jaya, yang berlokasi di Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Program urban farming di RPTRA Rawa Jaya melibatkan partisipasi masyarakat, khususnya warga RT 02/RW 04, dalam seluruh rangkaian kegiatan budidaya mulai dari penanaman, pemeliharaan, hingga pemanenan. Berbagai komoditas tanaman pangan seperti kangkung, bayam, cabai rawit, terong, selada, dan tomat dibudidayakan secara berkala dan hasilnya dimanfaatkan oleh peserta program untuk kebutuhan rumah tangga. Program ini telah menjadi bagian dari aktivitas rutin komunitas yang cukup mengakar di lingkungan RPTRA Rawa Jaya.

Meskipun manfaat tersebut telah dirasakan secara langsung oleh peserta program, sejauh mana program urban farming di RPTRA Rawa Jaya secara empiris berkaitan dengan ketahanan ekonomi keluarga peserta masih belum dapat diketahui secara objektif. Penelitian yang secara spesifik mengkaji keterkaitan program urban farming berbasis komunitas di ruang publik dengan

ketahanan ekonomi keluarga dalam konteks perkotaan Indonesia masih relatif terbatas.

Sari dkk. (2021) meneliti manfaat urban farming terhadap penghematan belanja pangan di Surabaya dan menemukan adanya efisiensi yang signifikan, sementara Wijaya dan Mulyani (2020) mengkaji hubungan urban farming dengan ketahanan pangan keluarga di Bandung. Namun, studi-studi tersebut tidak menempatkan ketahanan ekonomi keluarga yang mencakup dimensi lebih luas dari sekadar ketahanan pangan, sebagai variabel utama, dan tidak menggunakan program berbasis ruang publik pemerintah seperti RPTRA sebagai lokasi penelitian.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang penelitian yang signifikan untuk dikaji lebih lanjut, terutama dalam mengisi kekosongan bukti empiris mengenai keterkaitan program urban farming berbasis ruang publik dengan aspek ketahanan ekonomi keluarga di wilayah perkotaan. Terdapat setidaknya dua celah penelitian yang secara spesifik ditargetkan oleh penelitian ini. Pertama, celah kontekstual: penelitian urban farming di Indonesia lebih banyak dilakukan pada konteks kebun komunal informal, belum mengkaji secara sistematis program yang difasilitasi melalui ruang publik milik pemerintah seperti RPTRA, yang memiliki karakteristik khusus berupa dukungan institusional, keberlanjutan program terstruktur, dan akses terbuka bagi masyarakat. Kedua, celah metodologis: sebagian besar penelitian yang ada menggunakan pendekatan deskriptif atau kualitatif; penelitian yang mengukur keterkaitan antar variabel secara kuantitatif dengan desain survei yang memadai masih sangat terbatas.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, terdapat argumentasi yang kuat bahwa urban farming memiliki relevansi penelitian yang tinggi dalam hal ketahanan ekonomi keluarga di Jakarta. Kondisi perkotaan Jakarta yang ditandai oleh kepadatan penduduk tinggi, ketergantungan penuh terhadap mekanisme pasar dalam pemenuhan kebutuhan pangan, besarnya proporsi pengeluaran pangan dalam anggaran rumah tangga, serta tekanan inflasi pangan yang terus berlangsung, semuanya menciptakan konteks di mana strategi adaptasi ekonomi berbasis pemanfaatan sumber daya lokal seperti urban

farming memiliki urgensi yang nyata. Program urban farming di RPTRA Rawa Jaya menjadi kasus yang menarik untuk dikaji lebih lanjut karena telah berjalan secara berkelanjutan dengan keterlibatan masyarakat yang terstruktur, namun keterkaitannya dengan ketahanan ekonomi keluarga belum pernah diukur secara sistematis. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan judul "Survei Hubungan Program Urban Farming dengan Ketahanan Ekonomi Keluarga di RPTRA Rawa Jaya."

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Tingginya ketergantungan keluarga perkotaan Jakarta terhadap mekanisme pasar dalam pemenuhan kebutuhan pangan menjadikan rumah tangga rentan terhadap guncangan inflasi pangan yang dapat mengguncang stabilitas ekonomi keluarga.
2. Inflasi pangan yang secara konsisten melampaui inflasi umum menciptakan tekanan pengeluaran yang tidak dapat ditunda, sehingga memicu efek penggeseran (crowding-out) terhadap pengeluaran non-pangan yang penting bagi keberlanjutan ekonomi keluarga.
3. Tekanan pengeluaran pangan mendorong keluarga perkotaan untuk mengembangkan strategi adaptasi ekonomi, salah satunya melalui produksi pangan mandiri berbasis pemanfaatan sumber daya lokal seperti urban farming.
4. Urban farming secara konseptual berpotensi berkaitan dengan ketahanan ekonomi keluarga melalui pengurangan pengeluaran pangan, perlindungan terhadap volatilitas harga pasar, dan pembebasan alokasi anggaran untuk pos pengeluaran lain yang lebih strategis.
5. Program urban farming di RPTRA Rawa Jaya telah berjalan secara berkelanjutan dengan melibatkan warga RT 02/RW 04 dalam kegiatan budidaya, namun keterkaitannya dengan ketahanan ekonomi keluarga peserta belum pernah diukur secara empiris.

6. Belum tersedia bukti empiris mengenai hubungan program urban farming dengan ketahanan ekonomi keluarga di RPTRA Rawa Jaya.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus dan terarah, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian dibatasi pada program urban farming yang dilaksanakan di RPTRA Rawa Jaya RT 02/RW 04, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.
2. Penelitian difokuskan pada hubungan program urban farming dengan ketahanan ekonomi keluarga masyarakat yang aktif terlibat dalam program.
3. Aspek ketahanan ekonomi keluarga yang dikaji meliputi aset finansial, pengurangan pengeluaran pangan, dan kemandirian kebutuhan dasar.
4. Penelitian tidak membahas ketahanan pangan dalam konteks kebijakan nasional, isu lingkungan hidup, aspek pemberdayaan masyarakat, maupun kondisi kemiskinan, dan tidak mengasumsikan peserta program sebagai kelompok masyarakat miskin.

D. Perumusan Masalah

Bagaimana hubungan program urban farming di RPTRA Rawa Jaya dengan ketahanan ekonomi keluarga masyarakat di RT 02/RW 04?

E. Tujuan Penelitian

Mengetahui hubungan program urban farming di RPTRA Rawa Jaya dengan ketahanan ekonomi keluarga masyarakat di RT 02/RW 04.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian akademik mengenai keterkaitan urban farming dengan ketahanan ekonomi keluarga di wilayah perkotaan.
 - b) Memperkaya literatur terkait pemanfaatan ruang publik sebagai sarana pendukung aktivitas ekonomi keluarga, khususnya melalui praktik pertanian komunitas di lingkungan urban.
 - c) Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji hubungan antara pemanfaatan ruang publik, pertanian komunitas, dan ketahanan ekonomi keluarga.
2. Kegunaan Praktis
- a) Memberikan masukan kepada pengelola RPTRA Rawa Jaya dan pemerintah daerah mengenai gambaran keterkaitan program urban farming dengan ketahanan ekonomi keluarga.
 - b) Memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program urban farming berbasis komunitas dalam mendukung kebutuhan rumah tangga masyarakat perkotaan.
 - c) Menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan program urban farming berbasis komunitas yang mendukung ketahanan ekonomi keluarga di wilayah perkotaan.